



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
KABUPATEN-KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



**ADRIAN FERNANDES
06953011**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ADRIAN FERNANDES**
No. BP : 06 953 011
Program Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul : **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal Kabupaten – Kabupaten
di Propinsi Sumatera Barat**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 20 November 2010 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, November 2010

Pembimbing

Firdaus, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750727 200112 1004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 195410091980121001

Dr. H Yuskar, SE, MA, Akt
NIP. 19600911 198603 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, November 2010

Adrian Fernandes
06 953 011



No Alumni Universitas

ADRIAN FENANDES

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/ 07 Desember 1987 b). Nama Orang Tua : Firdaus dan Reni Aswita c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 06953011 f). Tanggal Lulus : 20 November 2010 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,15 i). Lama Studi : 4 tahun 3 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. M. Yamin No 3 Kel. Malana Ponco Kec. Lima Kaum, Kota Batusangkar.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten – Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat

Skripsi S-1 Oleh Adrian Fernandes Pembimbing : *Firdaus, SE, M.Si, Ak*

Abstrak

Penelitian ini mengarahkan untuk memberi keterangan empiris dan menguji dampak Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dengan menggunakan pooled data. Objek penelitian adalah kabupaten – kabupaten di propinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2007 – 2009 yang diperoleh dari BPS, situs dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah dan dengan mendatangi kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 56,4 % belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan 43,6 % sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya.

Keyword: APBD, Belanja Modal, Teori Keagenan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 November 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Edi Herman, MBA, Ak	Dr. Suhairi, M.Si, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi :

DR. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

_____ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten – Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata satu Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari doa, dukungan dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orangtua penulis, **Firdaus** dan **Reni Aswita**, yang selalu mendoakan, memberikan pengorbanan, nasehat, serta dukungan yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada adik ku **Resty Ulta Fiani** yang selalu memberikan support, dan menjadi motivasi bagi penulis.
2. **Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

3. **Bapak DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si. Ak**. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak**. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Drs. Edi Herman, MBA, Ak, Bapak Dr. Suhairi, M.Si, Ak** dan **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si. Ak** selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dalam ujian komprehensif serta atas saran-saran dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Program Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Untuk om ku Efry Trisman beserta keluarga dan om ku Elvis Rinaldi beserta keluarga, terima kasih atas bantuan, doa, perhatian, dukungan, saran dan motivasi yang selama ini telah diberikan.

10. Tak lupa pula untuk semua sepupu ku tersayang, terima kasih ya atas saran, masukan, motivasi dan doanya.
11. Untuk maktuo Misja beserta keluarga, maktuo Yusja (almarhumah) beserta keluarga, paktuo Amlius beserta keluarga, terima kasih atas bantuan, doa, perhatian, dukungan, saran dan motivasi yang selama ini telah diberikan.
12. Buat mantan – mantan ku dan teman dekat ku yang masih memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang sampai saat sekarang ini.
13. Buat teman – teman kosan ku yang tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu makasih atas dukungannya selama ini.
14. Untuk keluarga mama dickie, mama agan, mama aivan dan mama rian terima kasih atas saran, motivasi dan doanya.
15. Sahabat-sahabat kuliah ku **Tifani Dwi Sakura, Fuji Dewitamara, Shintia Anas Tasia S.E, Devi Khusnul Rizka S.E, Maharrani Fahmi S.E, Wuri Handayani S.E, Rama Yudi dan Yudi Syofananda** yang telah memberi pengalaman persahabatan yang berliku-liku tapi mengasyikkan.
16. Bwt semua teman-teman akuntansi 06 yang masih berjuang untuk menyelesaikan studi ini, semangat ya...!!!
17. Kakak-kakak dan adik-adik FEUA Program Reguler Mandiri yang banyak membantu penulis selama menjalani studi.

Semoga Allah membalas semua pengorbanan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran-saran untuk

kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI..... **v**

DAFTAR TABEL..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... 6

1.6 Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori 8

2.1.1 Anggaran Daerah Sektor Publik..... 8

2.1.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia..... 9

2.1.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik 10

2.1.4 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif..... 10

2.1.5 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik..... 11

2.1.6 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah
di Indonesia 12

2.1.7 Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah dan
Pengertian Pendapatan Daerah..... 13

2.1.8 Dana Alokasi Umum (DAU) 20

2.1.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)	21
2.1.10 Belanja Modal	25
2.1.10.1 Definisi dan Klasifikasi Asset Tetap	26
2.1.11 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.2.1 Populasi	36
3.2.2 Sampel	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Definisi Operasional Variabel	38
3.6 Metode Analisis.....	39
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	39
3.6.2 Teknik Pengujian Hipotesis.....	41

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data	44
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	44
4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	46
4.1.2.1 Uji Normalitas	47
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas.....	48
4.1.2.3 Uji Autokorelasi	50
4.1.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	50
4.1.3 Analisa Regresi Berganda.....	52
4.1.4 Pengujian Hipotesis	54
4.1.4.1 Uji R dan Uji R^2	54
4.1.4.2 Uji F	55
4.1.4.3 Uji T	56

4.2 Pembahasan.....	28
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1.1 Statistik Deskriptive	45
Tabel 4.1.2.2.1 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.1.2.2.2 <i>Coefficient Correlation</i>	49
Tabel 4.1.2.3 Hasil Pengujian <i>Durbin Watson</i> dengan <i>Predictors</i> (<i>Constant</i>).....	50
Tabel 4.1.2.4 Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 4.1.3 Analisa Regresi Berganda	52
Tabel 4.1.4.1 Hasil Uji R dan Uji R^2	54
Tabel 4.1.4.2 Hasil Uji F	55
Tabel 4.1.4.3 Hasil Uji t	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &

Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*

(Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-

program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN – KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal. Kedua, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal. Keempat, pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Serta memperdalam, mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan khususnya pada topik yang diteliti mengenai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya, memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta dilapangan dengan permasalahan tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dikembangkan dalam hal pengalokasian belanja modal.
3. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi program studi akuntansi serta bagi referensi dimasa yang akan datang.
4. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat juga dijadikan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan variabelnya. Serta dapat memberikan cakrawala yang lebih luas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan dan kerancuan pembahasan maka penulis membatasi permasalahan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di kabupaten – kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Data yang akan penulis gunakan adalah data pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi atas lima bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik yaitu: anggaran daerah sektor publik, proses penyusunan anggaran di Indonesia, hubungan keagenan dalam penganggaran sektor publik, hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters), hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran di Indonesia, identifikasi sumber pendapatan daerah dan pengertian pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metodologi Penelitian

Yang menerangkan tentang lokasi penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, populasi dan sampel serta metode analisa data.

Bab IV : Analisa data dan Pembahasan.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Key (1940) mengajukan pertanyaan berikut: "*on what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?*" Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi

dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993).

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan , yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

2.1.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam

pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

2.1.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan: *delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf*. Menurut Ross (1973) contoh-contoh hubungan keagenan sangat universal.

2.1.4 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

2.1.5 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Lane, 2000;13; Moe, 1984).

Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia & McCubbins (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.1.6 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-

sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.7 Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah dan Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi *identifikasi sumber pendapatan asli daerah* adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Sedangkan *pendapatan asli daerah* adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

A. Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Publik Investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilnya dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Di dalam Undang –Undang nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Selanjutnya dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d. Pajak hotel dan restoran 10 %
- e. Pajak hiburan 35 %
- f. Pajak reklame 25 %
- g. Pajak penerangan jalan 10 %

Tarif pajak untuk provinsi diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk kabupaten / kota selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

B. Retribusi Daerah

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Davey adalah :

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan.
2. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat

II menurut Kaho berikut ini :

1. Uang leges
2. Biaya jalan / jembatan / tol
3. Biaya pangkalan
4. Biaya penambangan
5. Biaya potong hewan
6. Uang muka sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Biaya penguburan

10. Biaya pengerukan wc
11. Retribusi pelelangan uang
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
14. Retribusi jembatan timbang
15. Retribusi stasiun dan taksi
16. Balai pengobatan
17. Retribusi reklame
18. Sewa pesanggrahan
19. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.
20. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya
21. Retribusi tempat rekreasi

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. **Retribusi jasa umum, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi jasa usaha, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

C. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa
 - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari sewa, bunga simpanan

giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.1.8 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

2.1.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DASAR HUKUM

- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK

- Kriteria pengalokasian DAK, yaitu:
 - a. **Kriteria Umum**, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
 - b. **Kriteria Khusus**, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c. **Kriteria Teknis**, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
- Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

ARAH KEGIATAN DAK

- **DAK Pendidikan**, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- **DAK Kesehatan**, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan

jaringannya termasuk poskedes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

- **DAK Keluarga Berencana**, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- **DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan**, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang di prioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
- **DAK Infrastruktur Irigasi**, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

- **DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi**, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- **DAK Pertanian**, yang diarahkan untuk sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- **DAK Kelautan dan Perikanan**, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- **DAK Prasarana Pemerintahan Daerah**, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/ perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.
- **DAK Lingkungan Hidup**, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air,

pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

- **DAK Kehutanan**, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan. DAK sarana dan prasarana perdesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.
- **DAK perdagangan**, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.1.10 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/ pengadaan asset tetap dan asset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
- Merupakan objek pemeliharaan.
- Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2.1.10.1. Definisi dan Klasifikasi Asset Tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Masa manfaat adalah: a) periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Kriteria aset tetap :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan

menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan asset tidak dapat diakui.

- b. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian asset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu asset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari suatu transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan asset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Saat pengakuan asset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka

asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Klasifikasi asset tetap :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin – mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Asset tetap lainnya

Asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.1.11 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2).

2.2 Penelitian Terdahulu

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat

beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Temuan ini mengkonfirmasi pendapat Colombatto (2001).

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar

desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian data panel (*pooled data*). Penelitian data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.. Dalam penyusunan laporan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi verifikasi dengan menggunakan pengujian hipotesis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diteliti, dengan berusaha mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan, serta menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan dari keadaan yang ada pada Pemerintahan Daerah Kabupaten – Kabupaten di Sumatera Barat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten – Kabupaten di Sumatera Barat terutama kabupaten yang baru pemekaran yaitu Kabupaten

Mentawai, kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Data APBD yang dari Data APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu dari tahun 2007 – 2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, data dikumpulkan dengan mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Barat. Data juga diperoleh dengan menggunakan riset kepustakaan melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi variabel sebagai berikut :

- a. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset).
- b. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita.
- c. PAD adalah Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- d. DAU adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- e. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan pengujian ada atau tidak pelanggaran terhadap uji asumsi klasik :

a. Uji normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal atau pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikan 0,05. data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov $Z > 0,05$

b. Uji AutoKorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi atau hubungan antar data yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi digunakan metode Durbin Watson. Untuk meliha ada tidaknya gejala

autokorelasi, data yang digunakan haruslah data yang rangkaian masa.

Syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah $-2 < dw < 2$ (Gujarati, 1999)

c. Uji heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik yang membentuk pola tertentu atau teratur (bergelombang, menyebar, atau menyempit). Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang berarti antara masing-masing variable independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah variabel independen dalam model tidak berkorelasi secara sempurna. Pengujian multikolinearitas menggunakan varians Inflation Factor (VIF). Apabila variabel independen memiliki angka VIF disekitar angka 1, dan nilai tolerance mendekati 1, maka dikatakan bahwa variabel independen tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.

3.6.2 Teknik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1\text{PDRB} + \beta_2\text{PAD} + \beta_3\text{DAU} + \beta_4\text{DAK} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

a = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = *error*

a. Pengujian Parsial

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t.

Uji t-stastik

Dilakukan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi linear berganda secara parsial

dengan mengasumsikan variable lain dianggap konstan dengan rumus

Sritua (1993) :

$$t = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

Dimana :

β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

$S\beta_n$ = Kofisien error masing-masing variabel

Ha diterima : $\rho < 0,05$ Ho ditolak

Ha ditolak : $\rho > 0,05$ Ho diterima

b. Pengujian secara Simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Uji F-Stastik

Digunakan untuk mengetahui apakah suatu model dapat memprediksi dengan baik atau tidak rumusnya sebagai berikut Gujarati (1997) :

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinan

N = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

Ha diterima : $\rho < 0,05$ Ho ditolak

Ha ditolak : $\rho > 0,05$ Ho diterima

c. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keceratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat seberapa besar proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas dengan rumus :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

ESS = Explained sum squares (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS = total sum squares (jumlah total kuadrat)

Ha diterima : $\rho < 0,05$ Ho ditolak

Ha ditolak : $\rho > 0,05$ Ho diterima

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Data

Penelitian data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Jenis penelitian ini adalah penelitian data panel (*pooled data*). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten – Kabupaten di Sumatera Barat terutama kabupaten yang baru pemekaran yaitu Kabupaten Mentawai, kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. Sampel adalah sebagian dari populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Data APBD yang dari Data APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu dari tahun 2007 – 2009.

4.1.1 Analisa Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, bagaimana profil, normalitas dan distribusi variabel – variabel selain variabel dummy. Dari hasil pengujian

tersebut diharapkan secara umum dapat melegitimasi data penelitian pada variabel yang akan digunakan dalam uji statistik

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk variabel – variabel selain variabel dummy yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya nilai rata – rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1
Statistik Descriptive

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	15	5979.00	37631.00	18387.27	7589.64048
DAU	15	188488.00	417432.00	275600.2	60099.03277
DAK	15	35993.00	59170.00	46433.53	7077.77037
PDRB	15	4.41	6.69	6.0153	.81194
BM	15	117490.00	185875.00	145955.5	20451.59162
Valid N (listwise)	15				

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.1.1 dapat dijelaskan bahwa rata – rata PDRB adalah sebesar 6.01% dengan standar deviasi 0.81%. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata - rata menunjukkan bahwa kelima kabupaten yang baru pemekaran di Sumatera Barat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. PDRB tertinggi sebesar 6.69% terdapat pada kabupaten Solok Selatan pada tahun 2009 sedangkan PDRB terendah sebesar 4.41% terdapat pada Kepulauan Mentawai pada tahun 2007.

Rata – rata Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten – Kabupaten di Sumatera Barat terutama kabupaten yang baru pemekaran yaitu Kabupaten Mentawai, kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun berturut – turut

adalah sebesar Rp18.384,27 dengan standar deviasi Rp. 7589.64. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata – rata menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lima kabupaten yang baru pemekaran di Sumatera Barat cukup tinggi. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp. 37.361 terdapat pada Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2009 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp 5.979 terdapat pada Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2007.

Rata – rata Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 275.600, 2 dengan standar deviasi Rp. 60.099,03. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata – rata menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Umum telah terlaksana dengan baik. Nilai DAU tertinggi sebesar Rp 417.432 yaitu pada Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2009 dan nilai DAU terendah sebesar Rp. 188.488 yaitu pada Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2007.

Rata – rata Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 46.433,53 dengan standar deviasi Rp.7.077,77. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa Pengalokasian Dana Khusus telah terlaksana dengan baik. Nilai DAK tertinggi sebesar Rp. 59.170 yaitu pada Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2007 dan nilai DAK terendah sebesar Rp. 35.993 yaitu pada Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2007

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan persamaan regresi, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian

agar model yang digunakan tersebut mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi (*BestLinear Unbiased Estimate*). Tujuan dari dilakukan pengujian ini adalah untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik model regresi. Pelanggaran terhadap asumsi klasik akan menyebabkan koefisien – koefisien regresi memiliki standar error atau variance yang besar sehingga dapat mengurangi keandalan penaksiran parameter. Selain itu, pelanggaran terhadap asumsi klasik juga dapat menyebabkan statistik yang dihasilkan dari analisis variance tidak akurat. Pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa pengujian yaitu pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal atau pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikan 0,05. data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov $Z > 0,05$.

Tabel 4.1.2.1
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sign	Keterangan
PAD	0.886	Normal
DAU	0.994	Normal
DAK	0.980	Normal
PDRB	0.074	Normal
Belanja Modal	0.835	Normal

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.1.2.1 diketahui bahwa untuk variabel return saham dan manajemen laba dalam penelitian ini memiliki nilai asymp sign (2tailed) lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan apakah terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat interkorelasi antara sesama variabel independen yang akan digunakan didalam model. Seberapa besar pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dan dapat juga dilihat dari koefisien korelasi antara variabel independen.

Pedoman suatu model regresi yang dikatakan bebas masalah multikolinearitas adalah :

- a. Mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10

- b. Koefisien korelasi antara variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5), jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas.

Hasil pengujian multikolinieritas antara variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.2.2.1
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
PAD	0.474	2.111
DAU	0.132	7.554
DAK	0.169	5.905
PDRB	0.753	1.328

Sumber: *www.idx.co.id, data diolah, 2010*

Tabel 4.1.2.2.2
Coefficient Correlations

	PDRB	PAD	DAK	DAU
PDRB	1.000	.333	.469	-.493
PAD	.333	1.000	.639	-.723
DAK	.469	.639	1.000	-.911
DAU	-.493	-.723	-.911	1.000

Sumber: *www.idx.co.id, data diolah, 2010*

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, ternyata tidak terdapat masalah multikolinieritas di antara variabel-variabel yang digunakan.

Hasil pengujian tersebut adalah :

- Nilai VIF dari masing-masing variabel berada dibawah angka 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10
- Coefficient Correlations* yang dihasilkan antar variabel independen jauh dibawah 0,5 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen

4.1.2.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson. Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu saling korelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam hal variabel independen. Hal ini terjadi karena inersia, bias spesifikasi (data variable) yang tidak dimasukkan, bentuk fungsional yang tidak benar). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin_Watson (dw test). Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pengujian diperoleh nilai DW statistik diantara -2 sampai +2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi (Santoso, 2000)

Tabel 4.1.2.3
Hasil Pengujian Durbin Watson dengan Predictors (Constant)

Variabel Independen	Durbin Watson
Belanja Modal	1.121

Sumber : Diolah dengan SPSS 15.0

Dari table 4.5. diatas diperoleh nilai DW sebesar 1.121 yaitu terletak pada kisaran -2 sampai dengan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi yang terjadi.

4.1.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan jika varian

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Secara teknik, uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode glesjer. Metode glesjer dilakukan dengan dua langkah utama yaitu pertama menghitung nilai residual dari persamaan regresi, kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan. Kedua dengan meregresikan nilai absolute residual tersebut dengan masing – masing variabel bebas. Jika variabel dependen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka akan ada indikasi terjadinya heterokedastisitas (Ghazali, 2001)

Tabel 4.1.2.4
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2272.476	9128.467		.119	.908
PAD	.134	.271	.151	.493	.633
DAU	-.071	.065	-.631	-1.092	.300
DAK	.921	.486	.968	1.893	.088
PDRB	3171.914	2010.571	-.382	-1.578	.146

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Data diolah dengan SPSS 15

Dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa masing – masing variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan PDRB setelah diregresikan dengan nilai absolute residual menunjukkan angka signifikan lebih besar dari 0,05 (> 0,05 = tidak signifikan) yaitu berturut – turut sebesar 0.633, 0.300, 0.088 dan 0.146 sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

4.1.3 Analisa Regresi Berganda

Analisa regresi berganda dilakukan untuk melihat pengaruh PAD, DAU, DAK dan PDRB terhadap belanja modal di lima kabupaten yang baru pemekaran di Propinsi Sumatera Barat.

Hasil analisa regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.1.3
Rangkuman Analisa Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	T hitung	Sign
(Constant)	8914.973	48746.800	.183	0.859
PDRB	12972.765	5123.721	2.532	0.030
PAD	3.080	0.691	4.457	0.001
DAU	0.499	0.165	3.025	0.013
DAK	3.016	1.240	2.433	0.035
R	0.830	F Hitung	5.522	
R ²	0.688	F table	3.478	
Adjusted R Square	0.564	Sign	0.013	
		T table	2.228	

Sumber : Data diolah 2010

Dari tabel 4.1.3, dapat dibuat persamaan regresi, yaitu sebagai berikut :

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$



$$y = 8914.97 + 12972,76 \text{ PDRB} + 3.080\text{PAD} + 0.499 \text{ DAU} + 3.016\text{DAK}$$

Dari tabel 4.1.3 dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 8914.973 mengindikasikan bahwa jika PDRB, PAD, DAU, dan DAK nilainya tetap maka belanja modal adalah sebesar 8914,97.

Koefisien regresi untuk variabel PDRB adalah sebesar 12972,76, mengindikasikan bahwa jika PAD, DAU dan DAK nilainya tetap dan setiap nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 1%, maka belanja modal akan

meningkat sebesar Rp. 12.972,76. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara PDRB dengan Belanja Modal, artinya semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula Belanja Modal

Koefisien regresi untuk variabel PAD adalah sebesar 3.080 mengindikasikan bahwa jika DAU, DAK dan PDRB nilainya tetap dan setiap nilai PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 maka belanja modal akan meningkat sebesar adalah sebesar 3.080. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara PAD dengan Belanja Modal, artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Koefisien regresi untuk variabel DAU adalah sebesar 0.499, mengindikasikan bahwa jika PAD, DAK dan PDRB nilainya tetap dan setiap nilai DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 1, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0.499. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Modal, artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Koefisien regresi untuk variabel DAK adalah sebesar 3.016, mengindikasikan bahwa jika PAD, DAU dan PDRB nilainya tetap dan setiap nilai DAK mengalami peningkatan sebesar Rp. 1, maka belanja modal akan meningkat sebesar 3.016. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara DAK dengan Belanja Modal,

artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi pula Belanja Modal

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Uji R dan Uji R²

Tabel 4.1.4.1
Hasil Uji R dan Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.830 ^a	0.688	0.564	13508.87019

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.1.4.1 diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.830. Hal tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel independen, dalam hal ini PAD, DAU, DAK dan PDRB dengan variabel dependen (belanja modal). Nilai R sebesar 0,830 menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan PDRB mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan belanja modal yaitu sebesar 83.%.

Nilai koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah diantara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dalam penelitian ini, nilai R^2 sebesar 0,688 mempunyai arti bahwa belanja modal mampu dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK dan PDRB sebesar 68.8%. Namun untuk variabel bebas yang lebih dari dua variabel, untuk uji koefisien determinasi menggunakan nilai *adjusted R²*. Nilai *adjusted R²* adalah 0.564 artinya secara bersama – sama variabel PAD, DAU, DAK dan PDRB mempengaruhi belanja modal sebesar 56.4%. Sedangkan sisanya 43.6% (100- 56.4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.1.4.2 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 4.1.4.2
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.031E9	4	1.008E9	5.522	0.013 ^a
Residual	1.825E9	10	1.825E8		
Total	5.856E9	14			

Sumber : Data diolah

Tabel 4.9 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen: PAD, DAU, DAK dan PDRB berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.

4.1.4.3 Uji T

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen yang lainnya. Pengujian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen atau pengujian secara individu (parsial) pada tingkat alpha 5% yang merupakan batas kesalahan menolak data.

Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial ditunjukkan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.3
Hasil Uji t

Variabel	Thitung	Sig.	Keterangan
PDRB	2.532	.030	Signifikan
PAD	4.457	.001	Signifikan
DAU	3.025	.013	Signifikan
DAK	2.433	.035	Signifikan

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.1.4.3 diperoleh nilai t hitung untuk PDRB sebesar 2.532 pada derajat bebas (df) = $n-k-1 = 15-4-1 = 10$, dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.228. Dengan demikian $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 0,030 ($sig < 0,05$). Berdasarkan analisis tersebut

dapat disimpulkan bahwa $H_a 1$ diterima dan $H_0 1$ ditolak artinya ***PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.***

Dari tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4.457 pada derajat bebas (df) = $n-k-1 = 15-4-1 = 10$, dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.228. Dengan demikian T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($sig < 0,05$). Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_a 2$ diterima dan $H_0 2$ ditolak artinya ***Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.***

Dari tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3.025 pada derajat bebas (df) = $n-k-1 = 15-4-1 = 10$, dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.228. Dengan demikian T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,013 ($sig < 0,05$). Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_a 3$ diterima dan $H_0 3$ ditolak artinya ***Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.***

Dari tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 2.433 pada derajat bebas (df) = $n-k-1 = 15-4-1 = 10$, dimana n = jumlah sampel, dan k = jumlah variabel independen, nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah 2.228. Dengan demikian T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,035 ($sig < 0,05$).

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a 4 diterima dan H_0 4 ditolak artinya *Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal*.

4.2 Pembahasan

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap variabel *belanja modal*. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,030 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05; dan nilai korelasi antara variabel ini dengan belanja modal yang sebesar 0,625 atau 62.5 persen. Artinya Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Hal ini berarti pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Variabel *PAD* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05; dan nilai korelasi antara variabel ini dengan belanja modal yang sebesar 0,816 atau 81.6 persen. Artinya *PAD* memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah telah terbukti. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah terbukti dapat merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel DAU memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,013 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian, berarti terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang juga mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Dan untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dalam APBD. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda (*ordinary least square*) dan menggunakan data panel.

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,013 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial variabel independen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain hanya dilakukan pada periode 2007-2009 karena data untuk variabel independen merupakan variabel baru sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini. Hasil *adjusted R-square* yang sebesar sebesar 0,564; berarti model dapat menjelaskan variasi belanja modal hanya sebesar 56,4 persen dan sisanya sebesar 43,6 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

5.3 Saran

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. *Corruption: A review of contemporary research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: <http://www.cmi.no>.
- Brodjonegoro, Bambang dan Nurkholis, 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIO, Indonesia, *Journal of Economic and Development*, Vol 3 No.2. Jan 2003, KANOPI (Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia) Universitas Indonesia.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Dougherty M.J., K.A. Klase & S.G. Song.2000. The Relationship Between Public Finance Issue, Financial Management Issue, And Conditions of Fiscal Stress in Small and Rural Government : The Case of West Virginia. *Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*. Vol. 12. Number 4. Winter. 545-565.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency theory: An assessment and review*. Academy of Management Review 14(1): 57-74.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper* 147.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Hagen, Terje P., Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 1996. Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures. *Journal of Theoretical Politics* 8(1): 41-63.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi – FE UGM.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127-146.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hyde, Albert C. & Jay M. Shafritz. (Eds.) 1978. *Government Budgeting: Theory, Process, and Politics*. Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc.
- Johnson, Cathy Marie. 1994. *The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Key, V.O. 1940. The lack of budgetary theory. *American Political Science Review* 34 (December), dalam Shafritz, Jay M. & Albert C. Hyde. 1997. *Classics of Public Administration*. Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol 49. Hal : 1-21.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Oates, Wallace E. 1995. Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*. Hal : 351-353
- Prawirosetoto, F.X. Yuwono, 2002. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, Vol 2, FE Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ross, Stephen A. 1973. The Economic Theory of Agency : The Principal's Problem. *American Economic Review*. Vol 3. No. 2. Hal : 134-139.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- <http://www.google.com>
- Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems. University of Minnesota, *working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Schiavo-Campo, Salvatore (Editor). 1999. *Governance, Corruption, and Public Management*. Manila: Asian Development Bank.
- Schick, Allen. 2001. Can national legislatures regain an effective voice in budgetary policy? *OECD Journal on Budgeting* 1(3): 15-42.
- Sekaran, Uma, 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4. Hal : 799-816.
- Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. *European Journal of Political Research* 37: 261-289.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika.
- Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413-423.
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah – Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Andalas

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI

Jl. Perintis Kemerdekaan 77 Padang - 25128 Telp. (0751) 33369 Fax. (0751) 36149

Website : <http://www.ekstensi-feua.or.id> E-mail : admin@ekstensi-feua.or.id

Nomor : 044/J.16.5/PPE/2010
Lampiran :
Perihal : Surat Permohonan Mendapatkan Data
Kepada Yth.

.....
di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara/i bahwa :

Nama : Adrian Fernandes
No BP : 06953011
Jurusan : Akuntansi

Datang menghadap Saudara/i untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan bagi penyiapan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul :

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”

Perlu dijelaskan bahwa setiap data dan informasi yang diperoleh semata-mata digunakan bagi keperluan ilmiah dan tidak untuk tujuan lainnya. Sehubungan dengan itu dimohonkan kesediaan dan bantuan saudara/i untuk memberikan keterangan atau data yang diperlukan demi tercapainya tujuan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan atas kesediaan dan bantuan saudara/i terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Padang, 11 Mei 2010
a.n Dekan Fakultas Ekonomi Unand
Ketua Program Studi Akuntansi

Dra. Sri Edmawati, Msi.Ak
NIP. 131 810 624

LAMPIRAN 2

SAMPEL DAFTAR KABUPATEN YANG DIJADIKAN SAMPEL

No	Nama Kabupaten
1	Kab. Pasaman Barat
2	Kab. Solok Selatan
3	Kab. Mentawai
4	Kab. Padang Pariaman
5	Kab. Dharmasraya

LAMPIRAN 3

PENDUKUNG HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Analisa Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BM	145955.5	20451.59162	15
PAD	18387.27	7589.64048	15
DAU	275600.2	60099.03277	15
DAK	46433.53	7077.77037	15
PDRB	6.0153	.81194	15

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, PAD ^a , DAK, DAU		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BM

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	120601.4	189299.1	145955.5	16968.14380	15
Std. Predicted Value	-1.494	2.554	.000	1.000	15
Standard Error of Predicted Value	4720.812	10976.008	7565.231	1963.179	15
Adjusted Predicted Value	112391.6	195950.7	144833.0	19929.05045	15
Residual	-23079.4	16104.43	.00000	11417.07912	15
Std. Residual	-1.708	1.192	.000	.845	15
Stud. Residual	-2.192	1.779	.032	1.105	15
Deleted Residual	-37979.8	35867.00	1122.564	19868.73337	15
Stud. Deleted Residual	-2.884	2.042	.007	1.265	15
Mahal. Distance	.776	8.309	3.733	2.348	15
Cook's Distance	.001	.777	.177	.254	15
Centered Leverage Value	.055	.593	.267	.168	15

a. Dependent Variable: BM

Tabel 2 Uji Normalitas

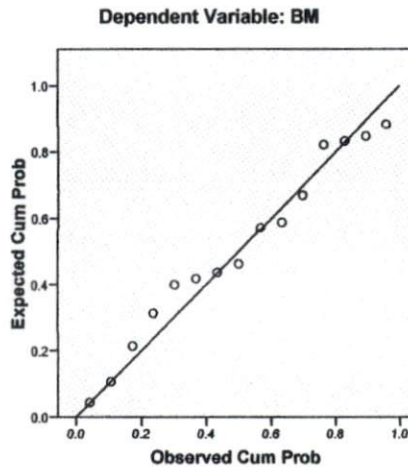
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU	DAK	PDRB	BM
N		15	15	15	15	15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	18387.27	275600.2	46433.53	6.0153	145955.5
	Std. Deviation	7589.640	60099.03	7077.770	.81194	20451.59
Most Extreme Differences	Absolute	.151	.109	.121	.332	.160
	Positive	.151	.109	.121	.203	.160
	Negative	-.120	-.083	-.107	-.332	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.583	.422	.470	1.285	.621
Asymp. Sig. (2-tailed)		.886	.994	.980	.074	.835

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Coefficients

Mod		Instandardize		Standardize	t	Sig.	Confidence Interval		Correlations			Linearity Statistics		
		B	Std. Error				Beta	Lower	Upper	Zero-order	Partial	Part	olerance	VIF
1	(Const)	4.973	6.800		.183	.859	899.667	529.612						
	PAD	3.080	.691	1.143	4.457	.001	1.540	4.620	.580	.816	.787	.474	2.111	
	DAU	.499	.165	1.468	3.025	.013	-.867	-.132	-.011	.691	.534	.132	7.554	
	DAK	3.016	1.240	1.044	2.433	.035	.254	5.778	-.109	.610	.429	.169	5.905	
	PDRB	2.765	3.721	.515	2.532	.030	556.404	389.126	.240	.625	.447	.753	1.328	

^aDependent Variable: BM

Coefficient Correlations

Model		PDRB	PAD	DAK	DAU
1	Correlations				
	PDRB	1.000	.333	.469	-.493
	PAD	.333	1.000	.639	-.723
	DAK	.469	.639	1.000	-.911
	DAU	-.493	-.723	-.911	1.000
	Covariances				
	PDRB	3E+007	1179.354	2980.995	-417.477
	PAD	1179.354	.478	.547	-.083
	DAK	2980.995	.547	1.537	-.186
	DAU	-417.477	-.083	-.186	.027

a. Dependent Variable: BM

Correlations

		BM	PAD	DAU	DAK	PDRB
Pearson Correlation	BM	1.000	.580	-.011	-.109	.240
	PAD	.580	1.000	.445	.069	.036
	DAU	-.011	.445	1.000	.820	.178
	DAK	-.109	.069	.820	1.000	-.053
	PDRB	.240	.036	.178	-.053	1.000
Sig. (1-tailed)	BM	.	.012	.484	.349	.195
	PAD	.012	.	.048	.404	.449
	DAU	.484	.048	.	.000	.263
	DAK	.349	.404	.000	.	.426
	PDRB	.195	.449	.263	.426	.
N	BM	15	15	15	15	15
	PAD	15	15	15	15	15
	DAU	15	15	15	15	15
	DAK	15	15	15	15	15
	PDRB	15	15	15	15	15

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Error Sum of Squares	Estimate of Error Variance	Change Statistics				Durbin-Watson	
					Change in R Square	Change in F	df1	df2		
1	.830 ^a	.688	.564	3.87019	.688	5.522	4	10	.013	1.121

^aPredictors: (Constant), PDRB, PAD, DAK, DAU

^bDependent Variable: BM

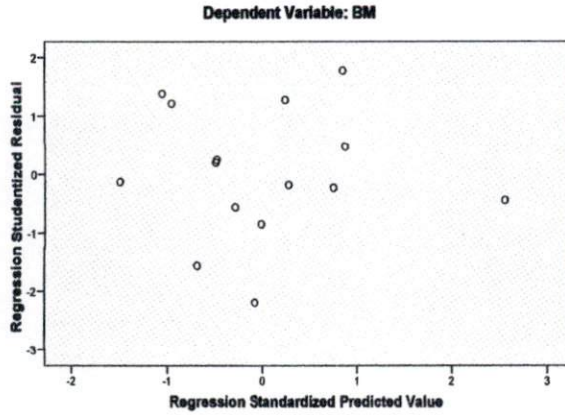
Tabel 5 Uji Heterokedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2272.476	9128.467		.119	.908
	PAD	.134	.271	.151	.493	.633
	DAU	-.071	.065	-.631	-1.092	.300
	DAK	.921	.486	.968	1.893	.088
	PDRB	3171.914	2010.571	-.382	-1.578	.146

a. Dependent Variable: AbsUt

Scatterplot



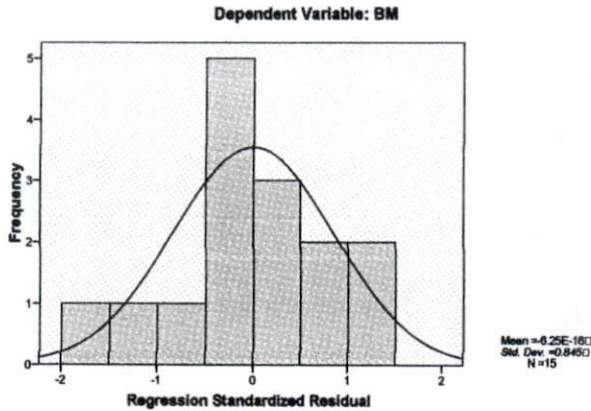
Tabel 6 Analisa Regresi Berganda

Coefficients

Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.	Confidence Interval		Correlations			Linearity Statistics		
		B	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Collinearity	VIF	
1	(Constant)	4.973		.183	.859	99.667	129.612						
	PAD	3.080	.691	1.143	4.457	.001	1.540	4.620	.580	.816	.787	.474	2.111
	DAU	.499	.165	1.468	3.025	.013	-.867	-.132	-.011	.691	.534	.132	7.554
	DAK	3.016	1.240	1.044	2.433	.035	.254	5.778	-.109	.610	.429	.169	5.905
	PDRB	2.765	3.721	.515	2.532	.030	56.404	89.126	.240	.625	.447	.753	1.328

a. Dependent Variable: BM

Histogram



Tabel 7 Uji R dan R²

Model Summary

Model	R	Square	Adjusted Square	Error Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					Square Change	df1	df2	F Change	Sig.	
1	.830 ^a	.688	.564	3.87019	.688	5.522	4	10	.013	1.121

^aPredictors: (Constant), PDRB, PAD, DAK, DAU

^bDependent Variable: BM

Tabel 8 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.0E+009	4	1007712665	5.522	.013 ^a
	Residual	1.8E+009	10	182489573.7		
	Total	5.9E+009	14			

^a Predictors: (Constant), PDRB, PAD, DAK, DAU

^b Dependent Variable: BM

Tabel 9 Uji T

Coefficients

Model		Standardized Coefficients		t	Sig.	Confidence Interval		Correlations			Tolerance Statistics		
		B	Std. Error			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4.973	6.800	.183	.859	99.667	29.612						
	PAD	3.080	.691	1.143	4.457	.001	1.540	4.620	.580	.816	.787	.474	2.111
	DAU	.499	.165	1.468	3.025	.013	-.867	-.132	-.011	.691	.534	.132	7.554
	DAK	3.016	1.240	1.044	2.433	.035	.254	5.778	-.109	.610	.429	.169	5.905
	PDRB	2.765	3.721	.515	2.532	.030	56.404	89.126	.240	.625	.447	.753	1.328

^aDependent Variable: BM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Adrian Fernandes
Tempat, Tanggal lahir : Batusangkar, 07 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.M.Yamin no 3, Malana, Batusangkar - Padang
Telp / HP : (0752)72309 / 081363382694

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1994 - 2000 : SDN No. 11 Batusangkar
2000 - 2003 : SMPN 1 Batusangkar
2003 - 2006 : SMAN 1 Batusangkar
2006 - 2010 : Universitas Andalas Padang Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya.

Padang, November 2010

(Adrian Fernandes)